

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era modern seperti saat ini, masyarakat telah dimudahkan dalam bertransaksi melalui transaksi non tunai. Transaksi non tunai dapat digunakan dalam transaksi bernilai kecil hingga transaksi yang bernilai besar. Kemunculan fasilitas transaksi non tunai tersebut tidak terlepas dari peran adanya jasa keuangan dan jasa perbankan. Dalam Budisantoso dan Nuritomo (2014:5) dijelaskan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 792 tahun 1990 tentang “Lembaga Keuangan”, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Namun, dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan biasanya diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan kegiatan utama tersebut, lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu bank dan non-bank. Koperasi simpan pinjam, perum pegadaian, perusahaan akuntansi, dana pensiun termasuk dalam lembaga keuangan non-bank.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dijelaskan bahwa, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan perbankan adalah perusahaan

yang menyangkut tentang bank yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Fahmi, 2014:2). Hal ini adalah karena bank adalah suatu lembaga perantara yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Karena fungsinya tersebut maka resiko yang harus dihadapi bank sangat besar. Bank diwajibkan memberikan laporan keuangan setiap periode tertentu yaitu: laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulan, dan laporan keuangan tahunan (Makaombohe dkk, 2014). Selain bank konvensional, sejak tahun 1992 berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Perbankan telah berdiri bank syariah yang pertama dengan nama Bank Muamalat (Setiawati, 2010). Berdasarkan statistic perbankan syariah yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2015, di Indonesia terdapat 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah, dan 161 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Undang-Undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Menurut Setiawati (2010), pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia dimotori oleh adanya kebijakan *dual banking system* di industri perbankan (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Peraturan ini memperbolehkan bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah yang merupakan cikal bakal berdirinya bank umum syariah pada umumnya (Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002

Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Pasal 1 Ayat 9).

Menurut penelitian, perbankan syariah memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan perbankan konvensional, antara lain bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, DPS bertugas dalam memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai dengan undang-undang tentang perbankan syariah tersebut, dalam menjalankan kegiatan usahanya bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah (*syari'a compliance*). Bank syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak diperkenankan melakukan manipulasi dalam laporan keuangannya, karena hal tersebut menentang prinsip-prinsip Islam.

Financial Accounting Standards Board (FASB) dalam *Statements of Financial Accounting Concepts* (SFAC) mengartikan laporan keuangan sebagai system dan sarana penyampaian (*means of communication*) informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui statemen keuangan (Suwardjono, 2014:101). Laporan keuangan merupakan media komunikasi antara prinsipal dan agen, selain itu laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai alat pengukuran kinerja agen dalam satu periode. Agar kinerja agen terlihat bagus maka agen melakukan tindakan *creative accounting*. Melalui

kebijakan-kebijakan yang diambil, agen sebagai pengelola perusahaan dapat melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri agar kinerja keuangan terlihat bagus, karena agen mengetahui kondisi internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan prinsipal selaku pemilik perusahaan hanya dapat mengawasi jalannya perusahaan melalui informasi yang diberikan agen. Terkadang informasi yang disampaikan agen tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Perbedaan kepentingan tersebut dapat memunculkan terjadinya asimetri informasi (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Machmuddah, 2015).

Menurut SFAC No. 1, dalam menaksir pertanggungjawaban dan kinerja manajemen yang menjadi perhatian utama adalah informasi laba. Manajemen yang kinerjanya dilihat berdasarkan informasi laba menyadari adanya kecenderungan untuk lebih memperhatikan laba. Hal tersebut dapat menimbulkan perilaku menyimpang manajemen, salah satunya adalah manajemen laba (Prasetya dan Gayatri, 2016). Menurut Rahmawati, dkk (2006) manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa. Sulistyanto (2008) memaparkan bahwa manajemen laba dilakukan dengan memainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab akrual merupakan

komponen yang mudah untuk dimainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan. Menurut pendapat Assih (2004) manajemen laba tidak selalu dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi akuntansi, tetapi lebih condong dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dalam batasan GAAP. Pihak-pihak yang kontra terhadap manajemen laba, menganggap bahwa manajemen laba merupakan pengurangan dalam keandalan informasi yang cukup akurat mengenai laba untuk mengevaluasi return dan resiko portofolionya (Suryanto, 2014).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan di perbankan konvensional, terbukti bahwa industry perbankan konvensional melakukan praktik manajemen laba. Adanya kebijakan *dual banking system* dalam industry perbankan konvensional seperti dipaparkan dalam UU no 21 tahun 2008, dimana bank syariah adalah bentuk ekspansi usaha perbankan konvensional, maka dalam perbankan syariah dimungkinkan terdapat praktik manajemen laba. Menurut Harahap dkk. (2006) dalam Setiawati (2010), secara syariah tidak diperkenankan adanya praktik manajemen laba. “Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (QS: 2, Ayat: 282). Namun Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan dalam pencatatan (laporan keuangan) sebaiknya digunakan

sistem akrual basis. Dalam Padmantyo (2010), pelaporan keuangan dan system akuntansi dalam Islam di desain sesuai dengan system ekonomi bisnis Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah (Hadist).

Menurut Scott (2011) dalam Anhara (2015) beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan *earning management*, antara lain adalah (1) Motivasi bonus, yaitu manajer akan berusaha mengatur laba bersih agar dapat memaksimalkan bonusnya; (2) Hipotesis perjanjian hutang (*Debt Covenant Hypothesis*), berkaitan dengan persyaratan perjanjian hutang yang harus dipenuhi, laba yang tinggi diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran syarat perjanjian hutang; (3) *Meet Investors Earnings Expectations and Maintain Reputation*, perusahaan yang melaporkan laba lebih besar daripada ekspektasi investor harga sahamnya akan mengalami peningkatan yang signifikan karena investor memprediksi perusahaan akan mempunyai masa depan yang lebih baik; (4) IPO (*Initial Public Offering*), manajer perusahaan yang akan *go public* termotivasi untuk melakukan manajemen laba sehingga laba yang dilaporkan menjadi tinggi dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Penelitian ini memfokuskan pada factor-faktor antara lain ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan pengawas syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitosari (2015) mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan

terhadap manajemen laba. Hal ini disebabkan baik perusahaan besar maupun kecil memiliki kecenderungan melakukan manajemen laba. Puspitosari (2015) juga meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian lain dilakukan oleh Suryanto (2014) mengenai pengaruh komite audit terhadap manajemen laba membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negative terhadap manajemen laba. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Puspitosari (2015) yang menunjukkan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini disebabkan keberadaan komite audit di dalam perusahaan tidak menjalankan tugasnya secara benar terutama dalam hal melakukan monitor atas pelaporan keuangan. Hal ini menjadi penyebab kegagalan komite audit dalam mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya manajemen laba di dalam perusahaan. Suryanto (2014) juga meneliti tentang pengaruh dewan pengawas syariah terhadap manajemen laba, hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisa Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Manajemen Laba Perbankan Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia), sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2016?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2016?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2016?
4. Apakah keberadaan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2016?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2016
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2016

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2016
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dewan pengawas syariah terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2016

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademisi

Dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang factor-factor yang berpengaruh terhadap manajemen laba khususnya tentang factor yang meliputi ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan pengawas syariah pada perbankan syariah.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya bagi perkembangan ilmu ekonomi di bidang manajemen laba perbankan syariah sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbankan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan pengawas syariah sehingga perbankan dapat membantu mengevaluasi dan meminimalisir praktek manajemen laba pada laporan keuangannya.

b. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun menjadi kajian bagi pengguna laporan keuangan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan pengawas syariah terhadap praktek manajemen laba.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan pengawas syariah terhadap praktek manajemen laba khususnya di perbankan syariah dan juga untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penelitian

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasan tentang pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan pengawas syariah terhadap manajemen laba dalam skripsi ini, maka penyusunan skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori tentang teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian, manajemen laba, serta variable-variabel yang mempengaruhinya yaitu ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan pengawas syariah. Serta berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis yang memberikan batasan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai variable penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai analisis deskriptif dari objek penelitian serta analisis data pengujian hipotesis dan pembahasan yang memaparkan hasil dari pengujian dan pembahasan keseluruhan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya.